

TESIS

**PERANAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN DEMI TERWUJUDNYA *MILLENNIUM DEVELOPMENT*
*GOALS (MDGs) 2015***



Disusun Oleh :

YULIANUS UROPDANA

No.Mhs. 115201598 / PS / MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Yulianus Uropdana
Nomor Mahasiswa : 115201598/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menanggulangi
Kemiskinan Demi Terwujudnya *Millennium Development Goals*
(MDGs) 2015

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr.W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

14/3/2013

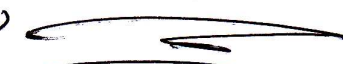
F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

14/3/2013

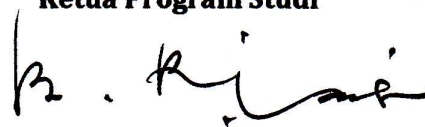
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : YULIANUS UROPDANA
NomorMahasiswa : 115201598/PS/MIH
Konsentrasi : HukumTata Negara
JudulTesis :Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam
Menanggulangi Kemiskinan Demi Terwujudnya
Millennium Development Goals (MDGs) 2015

NamaPenguji	Tanggal	TandaTangan
1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum	19/03/2013	
2. F. X, Endro Susilo, S. H., LL.M.	18/03/2012	
3. Dr. Al Wisnubroto SH., M. Hum	19-03-2012	

Ketua Program Studi


B.BambangRiyanto, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian tesis dengan judul “Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam menanggulangi Kemiskinan demi terwujudnya *Millennium Development Goals 2015*” adalah benar-benar hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Semua kutipan dari literatur, Peraturan perundang-undangan dan penulis bahan penulisan telah cantumkan sumbernya secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2013

Penulis

Yulianus Uropdana

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENGHARAPAN DI TENGAH-TENGAH PENDERITAAN

“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”.

(Mazmur 126 : 5-6)

“Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa”.

(Yeremia 1 : 5)

PENULISAN TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Allah Bapak, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria
2. Ayahanda Mitbungki Uropdana (almarhum) dan Ibunda Banganip Uropdana (almarhuma) yang telah menjadi orang tua terbaik. Terima kasih atas dukungan moril maupun spiritualnya kepada penulis.
3. Bapak Drs; Bitkimut Aguino Uropmabin beserta keluarga sebagai orang tua angkat yang setia membiayai pendidikan dalam menyelesaikan studi pascasarjana. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkati keluarga sekailian, Amin.
4. Kakadanda Maria Lois Uropmabin, S.Sos., dan Bapak Pieter Kalakmabin A.Md yang selalu setia memberikan motivasi meraih gelar Sarjana dan Magister Humaniora
5. Keluarga Uropdana, Uropmabin, Ningmabin, Yawalka, Oktemka, Kasipka, Sasaka, Kasipmabin, Kakyarmabin, Wayam, Ningdana, Tapyor, Obki, Kaladana, singpanki, Urpon, Asiki, Setamanki, Mimin, Kakadir beserta seluruh keluarga Aplim Apom di Kabupaten Pegunungan Bintang
6. Adinda Nihilianus Uropmabin, Benyamin Yawalka dan Prapasias Uropdana, yang selalu memberi motivasi tersendiri untuk tetap berjuang menempuh gelar ini. Tuhan Yesus Kristus beserta kalian semua.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapak di Surga yang telah melimpahkan Berkah, Rahmat, dan Anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Tesis yang berjudul ***“Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menanggulangi Kemiskinan Demi Terwujudnya Millennium Development Goals (MDGs) 2015”***. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum) pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi pengembang Hukum Tata Negara maupun beberapa komponen yang terkait dengan objek Permasalahan Penulisan ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, MA., Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu.
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Magister Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Pertama (I) penyusunan Tesis pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi, arahan dan koreksi selama kuliah maupun proses penulisan tesis sehingga penulis merasa diperhatikan dan dibesarkan.
3. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memperhatikan dan memberi pelayanan kemahasiswaan kepada penulis selama proses pendidikan.

4. Bapak F.X. endro Susilo, S.H., LLM, Selaku Dosen pembimbing II penyusunan tesis Sekaligus Wakil pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak, Ibu para dosen beserta seluruh staf administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membagi ilmu, memberi dorongan maupun pelayanan berarti selama penulis mengikuti perkuliahan pada program pasca sarjana .
6. Segenap rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan September 2010, yang selalu setia bersama, berdiskusi, dan membagi suka duka serta saling memberi motivasi dalam proses pendidikan.
7. Orestus Tanlain SH, Adino Nunes SH, di Timor Timur, Pemuda Ngalum/Okpol di Ngalum serta Ningbel KOMAPO di Yogyakarta. Kalian adalah pemberani dan pemenang yang selalu memberi motivasi tersendiri bagi penulis untuk meraih gelar ini.
8. Seluruh anak Yatim, Piatu, Janda, Duda yang selalu hidup dalam garis kemiskinan. Mohon doa restu semoga suatu saat hatiku untuk melayani anda-anda sekalian benar-benar terbukti.
9. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi kedepannya. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga penulisan hukum/tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 14 Maret 2013

Penulis

Yulianus Uropdana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
INTI SARI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Batasan Konsep.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Tujuan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pemerintah Provinsi Papua.....	21
B. Penanggulangan Kemiskinan.....	27
1. Pengertian Kemiskinan.....	27

2. Alasan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua	37
3. Sebab-sebab dan kategori kemiskinan	44
C. <i>Millennium Development Goals (MDGs)</i>	50
D. Landasan Teori.....	51
1. Teori Kesejahteraan (<i>Welfare Thory</i>)	52
2. Teori Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance Theory</i>)	53
3. Teori pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development theory</i>)	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Data penelitian	64
D. Metode Pengumpulan Data	65
E. Metode Analisis Data.....	67
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam Menanggulangi Kemiskinan demi terwujudnya <i>Millenium Development Goals</i> (<i>MDGs</i>) 2015	68
1. Komitmen Pemerintah terhadap pencapaian <i>MDGs</i> 2010-2015.....	68
2. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua.....	84
3. Peran Pemerintah Provinsi Papua.....	103
B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Propinsi Papua dalam menanggulangi Kemiskinan demi terwujudnya <i>Millennium Development Goals</i> 2015	137

1. Kendala-kendala Umum	137
a. Sumber daya Manusia	137
b. Letak Geografis.....	149
c. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan terpencil ..	152
d. Transportasi	153
e. Pemerintah daerah tertutup terhadap lembaga Adat dan Gereja	157
f. Hak Ulayat.....	159
g. Sejarah Integrasi Papua ke dalam NKRI.....	162
h. Kemenangan Pemekaran di atas Otonomi Khusus.....	166
i. Kebersihan Lingkungan	171
j. <i>Game</i> dan Judi Togel	172
2. Kendala-kendala Khusus.....	174
a. Keterlambatan Pencairan dana.....	174
b. Mutasi Pegawai	177
c. Benturan Regulasi.....	179
d. Terbatasnya sarana Operasional.....	180
e. Pengaruh Politik.....	181
C. Upaya – upaya yang dilakukan Pemerinsi Propinsi Papua dalam mengatasi kendala-kendala untuk menanggulangi Kemiskinan demi terwujudnya <i>Millennium Development</i> <i>Goals (MDGs) 2015</i>	182
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Program ...	182
2. Menetapkan Skala Prioritas masalah dan Wilayah.....	185
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Papua.....	187
4. Pemekaran Wilayah sesuai Kebutuhan	189

5. Evaluasi otonomi khusus dan Pemberdayaan	
Masyarakat lokal.....	191
6. Mengharapkan terpilihnya “ JOKOWI”	
baru di Papua.....	193
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	197
A. Kesimpulan	197
B. Saran.....	198
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Keaslian Penelitian 13
2. Tabel 2: Pencapaian IPM Papua Tahun 2009 dan 2010 107



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Sasaran Komitmen tingkat Kemiskinan tercapai Pemerintah Tahun 2010-2015.....	71
2. Gambar 2: Struktur organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.....	79
3. Gambar 3: Bagan sumber Pembayaran sumber dana APBN maupun APBD.....	83
4. Gambar 4: Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi	126
5. Gambar 5: Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/ Kota.....	131
6. Gambar 5: Alur mekanisme Pemantauan dan Evaluasi dari Provinsi ke Pusat.....	132
7. Gambar 6: Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi MDGs dari Kabupaten ke Provinsi	133

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Sekretariat Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Tabel HPI/ IPM Menurut Kabupaten Kota serta grafiknya di Provinsi Papua
3. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2007-2011 dan Persentasi PNS Pusat di Papua menurut Tingkat Pendidikan
4. Jumlah anggota DPRD Papua berdasarkan Fraksi periode 2009-2014 dan persentasi tingkat pendidikan
5. Luas Wilayah Provinsi menurut Kabupaten/ Kota, suhu udara maksimum dan minimum, banyaknya hari hujan, Jarak dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi serta antar Kota
6. Data AIV/ AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya di Provinsi Papua Tahun 2011 dan 2012
7. Daftar Peraturan daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan daerah khusus yang sudah maupun belum dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
8. Keputusan Gubernur Papua Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pembentukan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua.

ABSTRACT

Writing a thesis entitled: "The Role of Government in Papua Eradicate Extreme Poverty By Realizing the Millennium Development Goals (MDGs) 2015", aims to identify and analyze the role of the government in tackling kemiskinan Papua, the obstacles faced and the efforts penanggulannya.

The research was carried out with 2 (two) approaches the sociological and political approach to the law. Type pnelitiannya is normative by reading and studying the laws that never have there, in force, the writings of previous authors as well as some other guidelines related to poverty, the Millennium Development Goals, the role of government as well as other related materials.

Data analysis was applied five (5) legal duties that description, systematics, analysis of positive law, interpretation of positive law and positive law judge.

The results found that: The Role of the Papua provincial government to reduce poverty for the realization of the Millennium Development Goals (MDGs) 2015 do exist, but have various constraints such as the ineffectiveness of the functions of coordination, harmonization of vertical and horizontal, geographical conditions and safety due to historical issues and limitations human resources lead to poverty in Papua Province takes hard work, as per March 2012 statistics show an increase in poverty increased 21.80 thousand percent.

Keywords: The Provincial Government, Poverty, Millennium Development Goals (MDGs)

2015

INTI SARI

Penulisan tesis yang berjudul: "Peranan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menanggulangi Kemiskinan Demi Terwujudnya *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015", bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan pemerintah Provinsi Papua dalam menanggulangi kemiskinan, Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya- upaya yang penanggulangannya.

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) Pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan politik hukum. Jenis Penelitiannya adalah, normatif dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang pernah ada, sedang berlaku, hasil tulisan penulis terdahulu serta beberapa pedoman lain yang berkaitan dengan kemiskinan, *Millennium development goals*, peran pemerintah serta bahan-bahan terkait lainnya.

Analisis data menerapkan lima (5) tugas hukum yaitu deskripsi, sistematika, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

Hasil penelitian ditemui bahwa: Peranan pemerintah provinsi Papua untuk menanggulangi kemiskinan demi terwujudnya *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015 memang ada, namun mengalami berbagai kendala seperti belum efektifnya fungsi koordinasi, harmonisasi vertikal maupun horisontal, kondisi geografis dan keamanan akibat masalah-masalah sejarah serta keterbatasan sumber daya manusia menimbulkan kemiskinan di Provinsi Papua butuh kerja keras, karena data statistik per Maret 2012 menunjukkan peningkatan penduduk miskin bertambah 21,80 ribu persen.

Kata kunci: Pemerintah Provinsi Papua, Kemiskinan, *Millennium Development Goals (MDGs)* 2015